

**BAB II**

**INVESTASI AS DAN TIONGKOK PADA SEKTOR INFRASTRUKTUR  
DAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA PASCA PERANG  
DAGANG (2018-2024)**

Bab ini membahas dinamika investasi Amerika Serikat dan Tiongkok di Indonesia pada sektor infrastruktur dan sumber daya alam pasca perang dagang. Selain menguraikan pola dan perkembangan investasi Tiongkok, bab ini juga menyoroti bagaimana rivalitas kedua negara tercermin dalam praktik investasi. Pembahasan diperluas pada respons kebijakan Indonesia, khususnya strategi diplomasi pada era Joko Widodo. Dengan demikian, investasi tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika geopolitik dan strategi nasional Indonesia dalam merespons persaingan global.

**1.1 Dinamika Rivalitas As-Tiongkok dan Posisi Strategis Indonesia**

Rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok pasca Perang Dagang Amerika Serikat–Tiongkok tidak hanya terbatas pada ekonomi, tetapi juga meluas ke ranah teknologi, militer, dan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik. Dalam konteks ini, Indonesia memiliki posisi strategis karena letaknya pada jalur perdagangan internasional serta kedekatannya dengan kawasan konflik seperti Laut China Selatan. Oleh karena itu, subbab ini menjadi dasar untuk memahami bagaimana rivalitas tersebut memengaruhi posisi Indonesia, serta bagaimana dinamika tersebut tercermin dalam pola investasi dan respons kebijakan Indonesia pada subbab berikutnya.

### 1.1.1 Sejarah Rivalitas AS-Tiongkok

Rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi salah satu isu penting dalam hubungan internasional beberapa tahun terakhir. Amerika Serikat sudah lama dikenal sebagai negara dengan kekuatan besar, baik dari segi ekonomi, militer, maupun teknologi. Posisi ini membuat Amerika Serikat memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam sistem internasional. Namun, perkembangan Tiongkok yang sangat pesat, terutama sejak awal abad ke-21, mulai mengubah keseimbangan tersebut. Tiongkok tumbuh menjadi kekuatan ekonomi baru yang mampu menyaingi dominasi Amerika Serikat (Andrena, 2025).

**Gambar 2. 1 Timeline Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok**



Menurut Council on Foreign Relations 2025 yang ditulis oleh Xinhua (2025) persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok semakin terlihat jelas sejak Donald Trump menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Pada periode ini, kebijakan luar negeri AS bergeser ke arah yang lebih berorientasi pada kepentingan nasional, dengan pengurangan keterlibatan dalam kerja sama multilateral dan penekanan pada hubungan bilateral. Pendekatan ini didasarkan pada anggapan bahwa sistem sebelumnya tidak memberikan keuntungan optimal bagi Amerika Serikat.

Dalam bidang perdagangan, pemerintahan Trump mengambil langkah tegas untuk mengatasi defisit perdagangan melalui peninjauan ulang perjanjian dan

penerapan tarif terhadap mitra dagang, terutama Tiongkok (Alifath et al., 2025). Ketegangan meningkat pada awal 2018 ketika AS menuduh Tiongkok melakukan pelanggaran hak kekayaan intelektual, termasuk pencurian teknologi dan kebijakan industri yang merugikan perusahaan asing. Tuduhan ini diikuti dengan pemberlakuan tarif pada berbagai produk impor seperti sektor teknologi, transportasi, kesehatan, serta produk lain seperti panel surya dan mesin cuci (Yohana, 2025). Tiongkok merespons dengan tarif balasan, khususnya pada sektor pertanian, sehingga memicu perang dagang.

Persaingan kemudian meluas ke sektor teknologi strategis. Isu pengembangan jaringan 5G menjadi sorotan, terutama terkait perusahaan seperti Huawei yang dianggap oleh AS berpotensi menimbulkan risiko keamanan. Akibatnya, pembatasan kerja sama teknologi semakin memperdalam ketegangan.

Dampak perang dagang dirasakan oleh kedua negara, termasuk kenaikan harga barang impor, peningkatan biaya produksi, serta perlambatan investasi akibat ketidakpastian pasar. Fluktuasi pasar saham juga terjadi, terutama pada perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan Tiongkok. Selain itu, gangguan rantai pasok global mendorong negara lain, termasuk di kawasan ASEAN dan Asia Timur, untuk menyesuaikan kebijakan perdagangan mereka.

Upaya meredakan ketegangan sempat dilakukan dalam KTT G20 Osaka 2019 melalui kesepakatan melanjutkan negosiasi perdagangan. Hal ini dilanjutkan dengan Perjanjian Perdagangan Fase Satu pada Januari 2020, di mana Tiongkok berkomitmen meningkatkan impor barang dan jasa dari AS, mencakup sektor pertanian, energi, manufaktur, dan jasa. Perjanjian ini juga mencakup isu

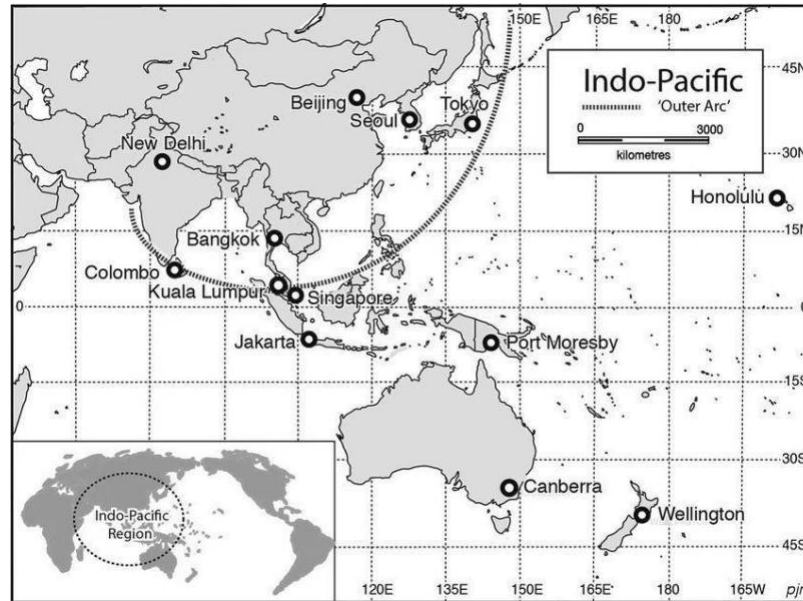
perlindungan hak kekayaan intelektual dan keterbukaan sektor keuangan. Namun, implementasi kesepakatan tersebut tidak berjalan optimal. Target impor tidak tercapai, dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 serta perbedaan kepentingan yang masih kuat di antara kedua negara. Isu teknologi dan keamanan tetap menjadi sumber ketegangan, sehingga persaingan AS–Tiongkok terus berlanjut hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa rivalitas kedua negara tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi politik dan strategi jangka panjang.

### **1.1.2 Posisi Strategis Indonesia**

Perkembangan rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok tersebut kemudian ikut mempengaruhi dinamika kawasan Indo-Pasifik, termasuk Indonesia. Menurut Rosmawandi (2022), sebagai negara berkembang dengan posisi geografis yang strategis dan kebutuhan pembangunan yang besar, Indonesia tidak bisa dilepaskan dari arus persaingan kedua kekuatan tersebut.

Atmoko et al., (2025) menjelaskan bahwa Indonesia berada pada posisi yang cukup penting karena letak geografisnya yang strategis serta perannya di kawasan Indo-Pasifik. Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di jalur perdagangan internasional yang ramai, sehingga memiliki nilai strategis dalam arus lalu lintas ekonomi dunia. Letak Indonesia yang berdekatan dengan Laut Cina Selatan juga membuatnya tidak bisa lepas dari dinamika kawasan. Aktivitas ekonomi, keamanan, dan politik di wilayah tersebut sering kali berkaitan dengan kepentingan negara-negara besar. Hal ini membuat Indonesia perlu lebih aktif dalam merespons perkembangan yang terjadi, meskipun tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri yang sudah lama dianut.

**Gambar 2. 3 Letak Strategis Indonesia**



Sumber: *The Power of Geography* (2016), diakses melalui ResearchGate.

Posisi strategis ini menjadikan Indonesia sebagai bagian penting dalam jalur perdagangan internasional sekaligus berada dalam lingkup pengaruh dinamika kekuatan besar. Kedekatan dengan kawasan Laut Cina Selatan semakin memperkuat keterkaitan Indonesia dengan rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok. Kondisi tersebut dapat dipahami melalui pendekatan dalam hubungan internasional yang menekankan bahwa interaksi antarnegara tidak dapat dilepaskan dari perebutan pengaruh dan kekuasaan. Dalam konteks rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, persaingan tersebut dapat dilihat sebagai upaya kedua negara dalam mempertahankan posisi dominan di tingkat global.

Dalam situasi seperti itu, Indonesia tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari dinamika persaingan kedua negara tersebut. Namun demikian, Indonesia juga tidak berada dalam posisi untuk secara tegas berpihak kepada salah satu kekuatan. Hal ini berkaitan dengan prinsip politik luar negeri bebas-aktif yang menjadi dasar kebijakan luar negeri Indonesia, di mana Indonesia tidak memihak blok tertentu

tetapi tetap aktif dalam menjaga hubungan internasional.

Penerapan prinsip tersebut dalam praktiknya tidak terlepas dari berbagai tantangan, mengingat Amerika Serikat dan Tiongkok sama-sama memiliki kepentingan strategis di Indonesia, terutama dalam bidang ekonomi. Tiongkok, misalnya, menjadi salah satu mitra dagang utama Indonesia sekaligus investor penting dalam berbagai proyek infrastruktur seperti transportasi, kawasan industri, dan sektor energi. Keterlibatan tersebut memberikan kontribusi terhadap percepatan pembangunan nasional, khususnya dalam peningkatan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah.

Di sisi lain, kerja sama Indonesia dengan Amerika Serikat juga tetap berjalan, terutama dalam bidang pertahanan, pendidikan, serta pengembangan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia berupaya menjaga keseimbangan hubungan dengan kedua negara tersebut tanpa terjebak dalam keberpihakan yang bersifat eksklusif.

Selain aspek ekonomi dan kerja sama bilateral, dinamika rivalitas kedua negara juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh yang bersifat non-material, seperti daya tarik politik, budaya, dan institusional. Dalam hal ini, Joseph Nye menjelaskan bahwa kekuatan suatu negara tidak hanya bergantung pada kemampuan militer atau ekonomi, tetapi juga pada kemampuan untuk memengaruhi pihak lain melalui daya tarik atau *soft power*. Konsep ini relevan untuk memahami bagaimana Amerika Serikat dan Tiongkok tidak hanya bersaing melalui kekuatan material, tetapi juga melalui pengaruh dan citra di tingkat global.

Namun demikian, ketergantungan yang terlalu besar terhadap salah satu

mitra kerja sama dapat menimbulkan risiko tersendiri dalam jangka panjang. Dalam hubungan internasional, kerja sama ekonomi sering kali berkaitan dengan kepentingan strategis yang lebih luas. Oleh karena itu, pengelolaan hubungan luar negeri perlu dilakukan secara seimbang agar tidak mengurangi fleksibilitas kebijakan Indonesia di masa depan.

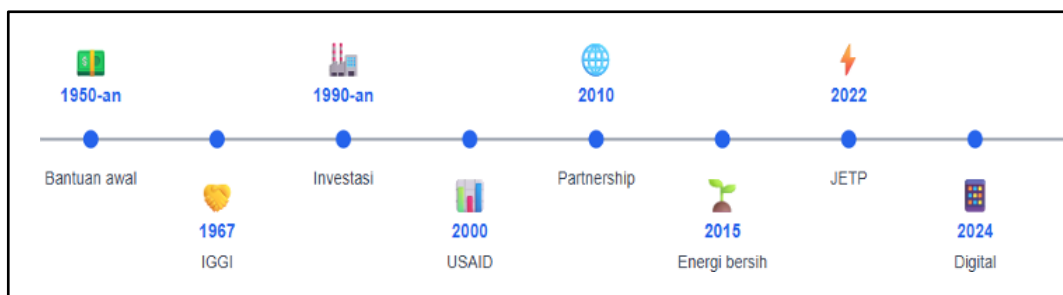
## **1.2 Data dan Pola Investasi Amerika Serikat di Indonesia (2018-2024)**

Kerja sama pendanaan antara Indonesia dan Amerika Serikat merupakan salah satu pilar penting dalam hubungan bilateral kedua negara yang telah berlangsung sejak awal masa kemerdekaan Indonesia (Kristianti & Rahayu, 2025). Pada dekade 1950-an, Amerika Serikat mulai memberikan bantuan ekonomi sebagai bagian dari upaya mendukung stabilitas dan pembangunan negara yang baru merdeka. Bantuan ini umumnya difokuskan pada pemulihan ekonomi, penguatan institusi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Tahap awal ini menjadi fondasi bagi hubungan kerja sama yang lebih terstruktur di masa berikutnya.

Memasuki tahun 1967, kerja sama berkembang melalui forum donor internasional seperti *Inter-Governmental Group on Indonesia* (IGGI), yang mengoordinasikan bantuan multilateral untuk mendukung pembangunan nasional Indonesia, terutama di sektor infrastruktur, pertanian, dan pendidikan pada era Orde Baru. Pada dekade 1990-an, terjadi pergeseran pola kerja sama dari bantuan hibah menuju keterlibatan sektor swasta. Investasi perusahaan Amerika Serikat mulai masuk ke sektor energi, pertambangan, dan manufaktur, menandai transisi menuju kerja sama yang lebih berbasis investasi dan orientasi keuntungan jangka panjang.

Memasuki era 2000-an, kerja sama diperluas melalui program *United States Agency for International Development (USAID)*, dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, dan tata kelola pemerintahan. Program ini mendukung agenda reformasi Indonesia pasca krisis ekonomi dan transisi demokrasi. Pada tahun 2010, hubungan ditingkatkan menjadi *Kemitraan Komprehensif* yang memperluas cakupan kerja sama ekonomi dan pembangunan. Sejak 2015, fokus mulai bergeser ke isu perubahan iklim dan energi bersih, termasuk dukungan terhadap energi terbarukan dan pengurangan emisi karbon. Puncaknya, pada 2022 diluncurkan *Just Energy Transition Partnership (JETP)* Indonesia sebagai komitmen pendanaan besar untuk mendukung transisi energi dari batu bara menuju energi yang lebih berkelanjutan. Hingga saat ini, kerja sama terus berkembang mencakup investasi hijau, transformasi digital, dan pembangunan berkelanjutan, mencerminkan hubungan yang semakin adaptif terhadap tantangan global.

**Gambar 2. 5 Timeline Kerjasama Amerika Serikat dan Indonesia**



Investasi Amerika Serikat di Indonesia selama periode 2018 hingga 2024 menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis (Kamalik et al., 2025). Meskipun tidak selalu berada di posisi teratas, Amerika Serikat tetap menjadi salah satu investor utama di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, terlihat adanya perubahan arah investasi, dari sektor berbasis sumber daya alam menuju sektor

teknologi dan energi baru. Berikut tabel sajian mengenai realisasi dan anggaran dari setiap investasi yang diberikan Amerika Serikat :

**Tabel 2.1 Tabel Realisasi dan Anggaran Pendanaan Amerika Serikat**

<b>Tahun</b>	<b>Investasi (USD)</b>	<b>Proyek</b>	<b>Keterangan</b>
2018	± 1,2 miliar	600 proyek	Didominasi sektor pertambangan
2019	± 0,8 miliar	500 proyek	Di dominasi sektor manufaktur dan industri dasar
2020	± 0,7 miliar	450 proyek	Didominasi sektor transportasi dan logistik
2021	± 1,5 miliar	900 proyek	Di dominasi sektor manufaktur dan industri dasar
2022	± 2,5 miliar	1.500 proyek	Peningkatan signifikan, masuk sektor digital
2023	± 2,7 miliar	1.800 proyek	Ekspansi pada sektor teknologi dan energi
2024	± 3,7 miliar	4.831 proyek	Fokus pada sektor teknologi dan hilirisasi

Sumber: BKPM, diolah

Jika dilihat dari sektor investasi, investasi Amerika Serikat di Indonesia selama periode 2018–2024 menunjukkan beberapa pola utama. Pertama, sektor tradisional seperti pertambangan tetap menjadi tujuan penting, dengan peran perusahaan seperti Freeport Indonesia dan ExxonMobil. Sektor ini relatif stabil karena berkaitan dengan kebutuhan energi dan pemanfaatan sumber daya alam (The Jakarta Post, 2025). Kedua, sektor industri seperti kimia dan farmasi juga memberikan kontribusi signifikan, terutama dalam kegiatan manufaktur bahan baku dan produk kesehatan yang didorong oleh peningkatan kebutuhan domestik. Ketiga, sejak sekitar 2020 terjadi pergeseran ke sektor berbasis teknologi. Perusahaan seperti *Microsoft* dan *Amazon Web Services* mulai mengembangkan infrastruktur

digital di Indonesia, termasuk pusat data dan layanan komputasi awan, yang mencerminkan potensi besar pasar digital Indonesia (Indonesia News Center, 2024).

Selain itu, sektor energi baru dan terbarukan mulai mendapat perhatian, seperti investasi pada panel surya dan teknologi *carbon capture and storage* (CCS), sejalan dengan upaya transisi energi dan keberlanjutan. Dari sisi tren, investasi Amerika Serikat tidak selalu stabil. Penurunan terjadi pada 2019–2020 akibat ketidakpastian global dan pandemi COVID-19 yang membuat investor menahan ekspansi. Namun, sejak 2021 tren mulai pulih, dengan peningkatan signifikan pada 2022–2023 yang menunjukkan kembalinya kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia.

Perubahan penting lainnya adalah pergeseran fokus investasi. Jika sebelumnya didominasi sektor pertambangan, dalam beberapa tahun terakhir mulai beralih ke sektor teknologi dan energi. Dari sisi karakteristik, investasi Amerika Serikat umumnya memiliki standar tinggi dalam transparansi dan tata kelola, serta sering menggunakan skema joint venture dengan mitra lokal, yang berpotensi mendorong transfer teknologi dan peningkatan kapasitas domestik. Di sisi lain, investasi ini cenderung selektif dan berfokus pada sektor bernilai tambah tinggi serta berorientasi jangka panjang.

Jika dilihat dari pola perkembangan investasi Amerika Serikat di Indonesia, terdapat kecenderungan perubahan arah investasi dari sektor tradisional menuju sektor yang lebih strategis dan berbasis teknologi. Pergeseran ini menunjukkan bahwa investasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga mencerminkan kepentingan jangka panjang dalam mempertahankan pengaruh

di sektor-sektor strategis. Dalam konteks hubungan internasional, pola tersebut dapat dijelaskan melalui konsep *hedging* yang digunakan dalam kajian strategi negara di kawasan Asia Tenggara. Menurut Evelyn Goh, *hedging* merupakan strategi di mana negara tidak secara tegas berpihak pada satu kekuatan besar, melainkan mengkombinasikan kerja sama ekonomi, politik, dan keamanan untuk menjaga fleksibilitas kebijakan serta meminimalkan risiko ketergantungan.

*“hedging is a set of strategies aimed at avoiding having to choose one side at the expense of another, while maintaining a degree of strategic ambiguity and flexibility also a set of strategies aimed at avoiding (or planning for contingencies in) a situation in which states cannot decide upon more straightforward alternatives such as balancing, bandwagoning, or neutrality”*- (Evelyn Goh dikutip dalam Koga, 2018)

Dalam konteks investasi Amerika Serikat di Indonesia, strategi tersebut dapat dilihat dari upaya Amerika Serikat untuk tetap hadir di sektor-sektor strategis seperti teknologi digital dan energi, meskipun secara nilai investasi tidak selalu mendominasi dibandingkan negara lain. Kehadiran ini menunjukkan bahwa investasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mempertahankan pengaruh dalam persaingan dengan negara lain, khususnya Tiongkok.

### **1.3 Data dan Pola Investasi Tiongkok Di Indonesia (2018-2024)**

Hubungan ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Setelah normalisasi hubungan diplomatik pada tahun 1990, kedua negara mulai memperkuat kerja sama di berbagai bidang, terutama perdagangan dan investasi. Namun, peningkatan paling signifikan terjadi sejak awal abad ke-21, ketika Tiongkok berkembang menjadi salah

satu kekuatan ekonomi global.

Perkembangan kerja sama ini semakin menguat setelah peluncuran inisiatif Belt and Road Initiative pada tahun 2013. Inisiatif ini merupakan strategi pembangunan global yang diprakarsai oleh Presiden Xi Jinping yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antarnegara melalui pembangunan infrastruktur, kerja sama perdagangan, integrasi keuangan, dan hubungan antar masyarakat (*people-to-people bonds*) (State Council Information Office of China, 2023).

*“The Belt and Road Initiative (BRI) is a global infrastructure development strategy proposed by Chinese President Xi Jinping in 2013, aiming to enhance policy coordination, infrastructure connectivity, unimpeded trade, financial integration, and people-to-people bonds among participating countries.”*- (State Council Information Office of China, 2023).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Belt and Road Initiative merupakan strategi pembangunan global yang tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga mencakup penguatan koordinasi kebijakan, integrasi perdagangan, serta kerja sama ekonomi dan sosial antarnegara peserta. Dengan demikian, BRI dapat dipahami sebagai instrumen strategis yang memperluas keterhubungan ekonomi Tiongkok dengan berbagai kawasan, termasuk Asia Tenggara. Inisiatif ini juga membuka peluang investasi besar Tiongkok di berbagai negara, termasuk Indonesia, khususnya pada sektor infrastruktur, energi, dan industri strategis. Indonesia menjadi salah satu tujuan utama investasi karena memiliki posisi geografis strategis serta sumber daya alam yang melimpah.

Dalam konteks Indonesia, implementasi inisiatif tersebut tercermin dalam meningkatnya arus investasi Tiongkok ke berbagai sektor strategis. Hal ini kemudian dapat dilihat lebih lanjut melalui pola perkembangan investasi Tiongkok

di Indonesia pada periode 2018–2024. Jika dilihat dari sektor investasi, investasi Tiongkok di Indonesia selama periode 2018–2024 menunjukkan beberapa pola utama. Pertama, sektor industri pengolahan menjadi tujuan dominan, terutama pada industri logam dasar dan pengolahan nikel. Hal ini sejalan dengan kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang diterapkan pemerintah Indonesia. Perusahaan-perusahaan Tiongkok banyak terlibat dalam pembangunan smelter dan kawasan industri berbasis mineral, khususnya di Sulawesi.

Kedua, sektor infrastruktur juga menjadi fokus penting, termasuk pembangunan kawasan industri, pembangkit listrik, serta proyek transportasi. Salah satu proyek yang paling menonjol adalah pembangunan kereta cepat Jakarta–Bandung yang melibatkan kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok. Selain itu, sektor energi, khususnya pembangkit listrik berbasis batu bara dan energi baru, juga menarik minat investasi dari Tiongkok.

Ketiga, dalam beberapa tahun terakhir mulai terlihat peningkatan investasi pada sektor teknologi dan ekonomi digital, meskipun belum sebesar investasi Amerika Serikat. Namun, perusahaan-perusahaan Tiongkok mulai memperluas investasi pada e-commerce, fintech, dan infrastruktur digital.

Dari sisi tren, investasi Tiongkok mengalami peningkatan yang cukup konsisten dibandingkan negara lain. Meskipun sempat mengalami perlambatan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, investasi kembali meningkat secara signifikan pada tahun-tahun berikutnya. Bahkan, Tiongkok beberapa kali menjadi salah satu investor terbesar di Indonesia.

Selain itu, karakteristik investasi Tiongkok cenderung berfokus pada proyek

berskala besar dan padat modal, sering kali terintegrasi dengan proyek infrastruktur dan industri. Investasi ini juga umumnya melibatkan perusahaan negara (*state-owned enterprises*) dan didukung oleh pembiayaan dari lembaga keuangan Tiongkok. Dalam banyak kasus, investasi dilakukan dalam bentuk kerja sama proyek jangka panjang yang terhubung dengan rantai pasok global.

Jika dilihat dari pola perkembangannya, investasi Tiongkok di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang kuat pada sektor strategis yang mendukung industrialisasi dan pembangunan infrastruktur. Dalam konteks hubungan internasional, pola ini dapat dipahami sebagai bagian dari strategi ekonomi dan geopolitik Tiongkok untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara, sekaligus mengamankan akses terhadap sumber daya alam dan jalur perdagangan.

**Gambar 2. 7 Peringkat Investor Terbesar Indonesia 2020-2024**

Trend Negara Asal PMA: Tahun 2020 – Desember 2024

2020	2021	2022	2023	2024
SINGAPURA US\$ 9,8 M - (34,1%)	SINGAPURA US\$ 9,4 M - (30,2%)	SINGAPURA US\$ 13,3 M - (29,1%)	SINGAPURA US\$ 15,4 M - (30,5%)	SINGAPURA US\$ 20,1 M - (33,5%)
R.R. TIONGKOK US\$ 4,8 M - (16,7%)	HONGKONG, RRT US\$ 4,6 M - (14,8%)	R.R. TIONGKOK US\$ 8,2 M - (18,0%)	R.R. TIONGKOK US\$ 7,4 M - (14,8%)	HONGKONG, RRT US\$ 8,2 M - (13,6%)
HONGKONG, RRT US\$ 3,5 M - (12,1%)	R.R. TIONGKOK US\$ 3,2 M - (10,2%)	HONGKONG, RRT US\$ 5,5 M - (12,1%)	HONGKONG, RRT US\$ 6,5 M - (12,9%)	R.R. TIONGKOK US\$ 8,1 M - (13,5%)
JEPANG US\$ 2,6 M - (9,1%)	AMERIKA SERIKAT US\$ 2,5 M - (8,2%)	JEPANG US\$ 3,6 M - (7,8%)	JEPANG US\$ 4,6 M - (9,2%)	MALAYSIA US\$ 4,2 M - (7,1%)
KOREA SELATAN US\$ 1,8 M - (6,3%)	JEPANG US\$ 2,3 M - (7,3%)	MALAYSIA US\$ 3,3 M - (7,3%)	MALAYSIA US\$ 4,1 M - (8,1%)	AMERIKA SERIKAT US\$ 3,7 M - (6,2%)

Keterangan:  
M : Miliar

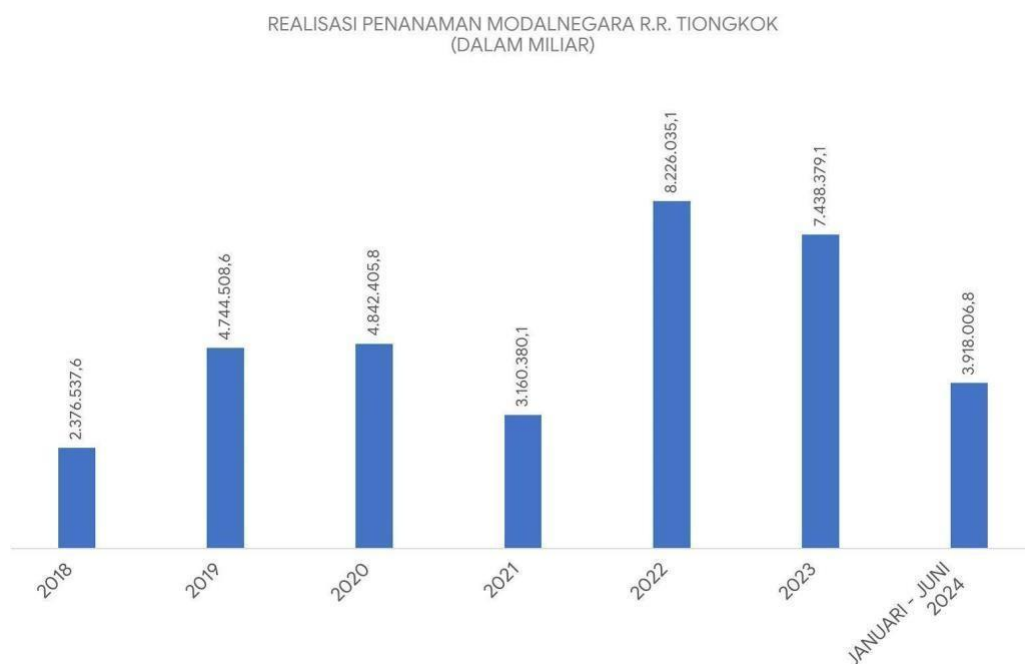
Sumber: BPKM (2025)

Investasi Tiongkok di Indonesia menunjukkan tren yang fluktuatif pada periode awal 2010–2015, sebelum mengalami peningkatan signifikan sejak 2016.

Penurunan pada beberapa tahun awal dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global dan penyesuaian kebijakan investasi. Namun, setelah 2016, terjadi peningkatan yang stabil seiring dengan penguatan kerja sama ekonomi bilateral.

Peningkatan paling signifikan terjadi pada periode 2022–2024, di mana investasi Tiongkok mencapai puncaknya di atas 8 miliar USD. Hal ini sejalan dengan meningkatnya proyek hilirisasi industri, terutama pada sektor nikel dan logam dasar, yang menjadi fokus utama investasi Tiongkok di Indonesia.

**Gambar 2. 9 Realisasi Penanaman Modal R.R Tiongkok 2010-2024**



Sumber : BPKM, diolah.

Dalam upaya meningkatkan realisasi investasi asing, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus mengoptimalkan strategi promosi investasi untuk menarik minat investor global, termasuk dari Tiongkok. Dikutip dari Press Release Laporan Kerja Kementerian Investasi tahun 2024, salah satu bentuk upaya tersebut dilakukan melalui partisipasi dalam forum internasional seperti China-ASEAN

Expo (CAEXPO) 2024.

CAEXPO merupakan pameran perdagangan internasional tahunan yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN. Dalam kegiatan tersebut, Indonesia melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melakukan sosialisasi kebijakan investasi kepada agen promosi investasi dari Tiongkok serta sembilan negara ASEAN, guna memperluas peluang kerja sama investasi di kawasan regional.

Dalam forum tersebut, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mendorong investor Tiongkok untuk memperkuat kolaborasi dengan mitra di kawasan ASEAN, termasuk Indonesia. Terdapat lima sektor strategis utama yang menjadi fokus kerja sama investasi, yaitu: (1) industri hilirisasi yang mencakup pengolahan mineral, pertanian, perikanan, dan produk kehutanan; (2) ekosistem kendaraan listrik dan baterai; (3) energi terbarukan, termasuk pengembangan jaringan listrik ASEAN dan integrasi energi hijau dalam sistem kelistrikan regional; (4) layanan kesehatan dan bioteknologi; serta (5) pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Secara keseluruhan, investasi Tiongkok di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dengan konsentrasi pada sektor industri pengolahan, infrastruktur, dan teknologi. Pola tersebut menunjukkan bahwa hubungan investasi kedua negara tidak hanya didorong oleh kepentingan ekonomi semata, tetapi juga memiliki dimensi strategis yang berkaitan dengan penguatan posisi Tiongkok di kawasan Asia Tenggara serta mendukung agenda industrialisasi dan pembangunan ekonomi Indonesia. Perkembangan ini juga tidak dapat dilepaskan dari arah kebijakan luar negeri Indonesia dalam mengelola kerja

sama dengan negara mitra strategis.

#### **1.4 Kebijakan Diplomasi Indonesia Era Pemerintahan Presiden Jokowi**

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang dilantik pada 20 Oktober 2014 menetapkan arah baru politik luar negeri Indonesia yang lebih berorientasi pada kepentingan domestik, khususnya dalam bidang ekonomi. Arah kebijakan tersebut dituangkan dalam lima prioritas utama, yaitu penanganan perbatasan, penguatan peran Indonesia dalam ASEAN, penguatan diplomasi ekonomi, perlindungan WNI dan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, serta peningkatan peran Indonesia dalam kerja sama global (Wardhani, 2023).

Dari kelima prioritas tersebut, diplomasi ekonomi menjadi pusat perubahan paling signifikan karena menandai pergeseran orientasi politik luar negeri Indonesia dari yang sebelumnya cenderung normatif menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada hasil. Pergeseran ini tidak terlepas dari kebutuhan Indonesia untuk mempercepat pembangunan nasional yang sangat bergantung pada investasi asing langsung atau *Foreign Direct Investment* (FDI), terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan industrialisasi.

Sejak awal pemerintahan, arah ini kemudian diterjemahkan ke dalam program quick wins Kabinet Kerja 2014 yang menempatkan perdagangan, maritim, dan investasi sebagai tiga pilar utama diplomasi Indonesia (Bappenas, 2014). Dalam kerangka ini, investasi asing tidak hanya dipandang sebagai sumber pembiayaan pembangunan, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mendorong transformasi ekonomi nasional.

Secara teoritis, peran investasi dalam pembangunan ekonomi telah lama dijelaskan dalam berbagai literatur. Tarigan (2025) menegaskan bahwa investasi berperan dalam meningkatkan kapasitas produksi dan menciptakan lapangan kerja, sementara Khakim (2022) melihat investasi sebagai pengeluaran untuk meningkatkan kemampuan produksi barang dan jasa dalam perekonomian. Dalam kerangka pertumbuhan ekonomi, Harrod-Domar menekankan bahwa investasi memiliki fungsi ganda, yaitu menciptakan pendapatan sekaligus memperbesar kapasitas produksi (Arsyad, 1997). Dengan demikian, investasi menjadi elemen kunci dalam strategi pembangunan negara berkembang seperti Indonesia (Saputro & Taufiequrrohman, 2021).

Berangkat dari penelitian yang dilakukan Saputro & Taufiequrrohman (2021), pemerintah Indonesia kemudian meluncurkan paket kebijakan ekonomi secara bertahap sejak 2015 hingga 2017 yang berjumlah 16 paket. Kebijakan ini berfokus pada deregulasi, penyederhanaan perizinan, dan perbaikan iklim investasi untuk mengurangi hambatan struktural yang selama ini menjadi bottleneck masuknya FDI. Dengan kata lain, kebijakan ini merupakan upaya sistematis untuk menjadikan Indonesia lebih kompetitif dalam menarik investasi global.

Dalam perkembangannya, kebijakan diplomasi ekonomi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika global, khususnya rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Kedua negara ini merupakan aktor utama dalam arus investasi global dan memiliki pengaruh besar terhadap pola investasi di negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Indonesia tidak memilih untuk berpihak pada salah satu kekuatan, melainkan mengadopsi strategi yang

dikenal sebagai *hedging*, yaitu menjaga keseimbangan hubungan dengan kedua negara untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi nasional. Strategi ini memungkinkan Indonesia tetap menerima investasi dari kedua pihak tanpa terjebak dalam rivalitas geopolitik mereka. Kebijakan diplomasi Indonesia dalam konteks ini dapat dipahami sebagai strategi *hedging*, yaitu menjaga keseimbangan hubungan dengan dua kekuatan besar melalui keterbukaan investasi.

<b>Aspek</b>	<b>Amerika Serikat</b>	<b>Tiongkok</b>
Karakter investasi	High-tech & compliance tinggi	Padat modal & proyek besar
Pendekatan Indonesia	Fasilitasi regulasi & digitalisasi	Kerja sama proyek strategis nasional
Instrumen diplomasi	Trade agreement, digital economy	BRI, infrastruktur, CAEXPO

Secara institusional, pelaksanaan kebijakan ini melibatkan beberapa aktor utama, yaitu Presiden Republik Indonesia sebagai penentu arah kebijakan strategis, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagai pelaksana diplomasi bilateral dan multilateral, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebagai garda utama dalam promosi dan fasilitasi investasi asing langsung. Selain itu, Kementerian Perdagangan dan Bank Indonesia turut berperan dalam menjaga stabilitas perdagangan dan arus modal.

Dalam implementasinya, kebijakan *hedging* Indonesia tercermin dari pola masuk investasi dari kedua negara besar tersebut dengan karakteristik sektor yang berbeda. Investasi Tiongkok cenderung terkonsentrasi pada sektor industri pengolahan, hilirisasi sumber daya alam seperti nikel, serta pembangunan infrastruktur berskala besar. Investasi Amerika Serikat lebih dominan pada sektor teknologi digital, energi bersih, layanan berbasis data, dan ekonomi berbasis inovasi.

Strategi ini didorong oleh beberapa faktor utama. Pertama, kebutuhan besar Indonesia terhadap pembiayaan pembangunan infrastruktur dan industrialisasi yang tidak dapat sepenuhnya dipenuhi oleh anggaran domestik. Kedua, meningkatnya kompetisi global dalam menarik FDI, di mana Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi dua sumber investasi terbesar dengan karakteristik yang berbeda. Ketiga, kebutuhan untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui diversifikasi mitra investasi agar tidak terjadi ketergantungan pada satu negara tertentu. Keempat, posisi geografis dan geopolitik Indonesia di kawasan Indo-Pasifik yang menjadikannya bagian penting dari rantai pasok global kedua kekuatan tersebut.

Dari sisi hasil, kebijakan ini berhasil meningkatkan arus investasi asing ke Indonesia dari kedua negara sekaligus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, industrialisasi, dan transformasi digital. Indonesia juga semakin memperkuat posisinya dalam rantai pasok global sebagai negara tujuan investasi strategis di kawasan Asia Tenggara. Namun, kebijakan ini juga menghadirkan tantangan berupa ketergantungan sektoral pada masing-masing negara, serta meningkatnya eksposur Indonesia terhadap dinamika geopolitik global.

Secara keseluruhan, kebijakan diplomasi Indonesia pada era Presiden Joko Widodo merupakan bentuk strategi ekonomi-politik yang adaptif. Dalam konteks rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, Indonesia berhasil memosisikan diri sebagai negara yang tidak terikat pada blok tertentu, tetapi aktif memanfaatkan kompetisi global untuk kepentingan pembangunan nasional melalui penguatan arus investasi asing langsung atau yang dikenal dengan (FDI).